

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ritual *Mappacakke Wanua* sebagai fokus penelitian dilandasi oleh berbagai pertimbangan kultural, dan aktual. Tradisi ini bukan sekadar upacara seremonial adat, melainkan sebuah sistem sosial yang kaya akan nilai-nilai fungsional dalam menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan masyarakat. *Mappacakke Wanua* mengandung unsur musyawarah, spiritualitas, solidaritas sosial, serta penghormatan terhadap warisan leluhur yang semuanya menjadikan tradisi ini sangat relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks kajian budaya dan antropologi.

Ritual ini memiliki makna etimologis yang dalam. Secara linguistik, kata "mappacakke" berasal dari bahasa Bugis yang berarti "mendinginkan" atau "menenangkan", sedangkan "wanua" berarti "negeri" atau "wilayah". Maka, secara luas *Mappacakke Wanua* dapat dimaknai sebagai proses memulihkan ketenangan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam suatu wilayah atau komunitas. Tradisi ini menjadi bentuk ekspresi kolektif masyarakat Luwu dalam menghadapi situasi sosial yang genting, seperti konflik internal, krisis moral, maupun bencana alam, dengan pendekatan budaya yang damai dan bermartabat.

Keputusan untuk meneliti *Mappacakke Wanua* juga didasari oleh keprihatinan terhadap semakin lunturnya praktik-praktik budaya lokal akibat globalisasi dan modernisasi. Tradisi ini termasuk dalam kategori kearifan lokal yang kini terancam keberlangsungannya karena kurangnya dokumentasi, regenerasi, serta perhatian dari kalangan akademik. Padahal, di balik pelaksanaan tradisi ini tersimpan sistem nilai yang masih sangat relevan untuk dijadikan model penyelesaian konflik secara kultural di tengah masyarakat modern yang cenderung individualistik dan



n peneliti terhadap ritual *Mappacakke Wanua* dari jurnal
Pengaruh Budaya Mappacekke Wanua Ditinjau dari
I". Ketertarikan peneliti dalam mengangkat ritual
ua sebagai topik penelitian salah satunya dipicu oleh

temuan dan gagasan yang terdapat dalam artikel “*Pengaruh Budaya Mappacakke Wanua Ditinjau dari Perspektif Sosial*”. Artikel tersebut membuka pandangan peneliti bahwa tradisi ini tidak hanya bersifat ritualistik atau seremonial semata, tetapi memiliki dimensi sosial yang kuat, khususnya dalam menjaga harmoni sosial dan menyatukan masyarakat yang sedang menghadapi situasi konflik atau ketegangan.

Artikel tersebut menggambarkan bahwa *Mappacakke Wanua* bukan hanya merupakan kegiatan warisan leluhur, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang efektif dalam menyatukan kembali masyarakat melalui simbol-simbol budaya, doa kolektif, serta partisipasi aktif berbagai elemen komunitas. Penjelasan ini memunculkan minat peneliti untuk menelusuri lebih dalam bagaimana struktur sosial masyarakat Luwu terbentuk dan terpelihara melalui praktik budaya tersebut. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana tradisi ini diterima oleh generasi sekarang dan bagaimana ia mampu bertahan serta beradaptasi dalam konteks kehidupan modern.

Peneliti beberapa kali terjun langsung mengikuti tradisi *Mappacakke Wanua* dan dari situ jugalah ketertarikan muncul. berangkat dari keprihatinan terhadap semakin lemahnya posisi budaya lokal di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini. Budaya lokal, khususnya tradisi-tradisi yang bersifat non-material seperti ritual dan upacara adat, semakin jarang dijadikan objek kajian akademik secara komprehensif, padahal di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang membentuk karakter dan identitas suatu masyarakat. Salah satu tradisi yang masih eksis dan hidup dalam masyarakat namun kurang mendapat perhatian secara ilmiah adalah *Mappacakke Wanua*, sebuah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Luwu sebagai upaya menyelesaikan konflik, membangun keharmonisan sosial, serta mempererat ikatan antaranggota komunitas.

Peneliti melihat bahwa tradisi *Mappacakke Wanua* bukan hanya sekedar pengetahuan budaya atau ritual simbolik yang diwariskan secara turun temurun, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial yang penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan. Tradisi ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, pemuka agama, pemimpin lokal, serta dilaksanakan dalam suatu mekanisme penyelesaian masalah yang



berbasis pada nilai-nilai musyawarah (*assitinajang*), penghormatan terhadap harga diri kolektif (*masseddi' siri'*), dan semangat gotong royong. Dalam tradisi ini, konflik tidak diselesaikan dengan cara konfrontatif atau hukum formal, melainkan melalui pendekatan yang humanistik dan restoratif, yang memprioritaskan pemulihan hubungan sosial serta pencapaian keseimbangan spiritual dan kultural.

Peneliti juga tertarik mengangkat judul ini karena *Mappacakke Wanua* memiliki struktur dan tahapan ritual yang unik dan sarat makna. Tiga tahapan utama dalam tradisi ini *Malekka Wae* (pengambilan air suci), *Maddoja Roja* (doa bersama sembilan ulama), dan *Mangeppi Wae* (pemercikan air suci ke wilayah komunitas) menjadi simbolisasi dari proses penyucian, penyatuan niat kolektif, dan penyebaran energi damai ke seluruh lapisan masyarakat. Setiap tahapan mengandung filosofi mendalam yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam budaya Bugis-Luwu, seperti penghormatan terhadap alam, spiritualitas, kolektivitas, dan kebersamaan.

Dari sinilah muncul ketertarikan peneliti untuk mengangkat judul "*Ritual Mappacakke Wanua di Kabupaten Luwu: Pendekatan Etnografi dan Kajian Budaya*". Peneliti ingin menelusuri lebih dalam bagaimana mekanisme penyelesaian masalah yang berbasis budaya ini bekerja dalam praktik, bagaimana nilai-nilai budaya ditanamkan dalam setiap tahap prosesi ritual, dan bagaimana masyarakat Luwu mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas kultural mereka.

Dengan menggunakan pendekatan etnografi, peneliti berharap dapat menangkap makna tradisi ini dari sudut pandang masyarakat itu sendiri (*emic perspective*), dan dengan landasan teori fungsionalisme, peneliti ingin menganalisis peran sosial tradisi ini dalam menjaga struktur masyarakat tetap stabil dan harmonis.

Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya bentuk dokumentasi budaya, melainkan juga wujud kontribusi akademik terhadap penguatan nilai-nilai sebagai pilar resolusi konflik yang berkelanjutan.



Sebagai teks akademik, peneliti merasa bahwa tradisi ini sangat layak untuk dianalisis melalui pendekatan etnografi dan teori fungsionalisme. Pendekatan etnografi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tradisi ini secara emik, yakni dari sudut pandang

pelaku budaya itu sendiri. Sementara itu, teori fungsionalisme memberikan kerangka analisis yang dapat menjelaskan bagaimana tradisi ini berfungsi dalam menopang struktur sosial masyarakat dan memenuhi kebutuhan kolektifnya. Dengan memadukan dua pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang holistik tentang bagaimana budaya lokal seperti *Mappacakke Wanua* dapat tetap bertahan, berkembang, dan berfungsi di tengah perubahan zaman.

Ketertarikan pribadi peneliti juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan kecintaan terhadap budaya Bugis-Makassar, serta keinginan untuk berkontribusi dalam pelestarian nilai-nilai tradisional yang berharga. Sebagai mahasiswa Sastra Daerah Bugis-Makassar, peneliti merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menggali dan mengangkat potensi budaya lokal yang belum banyak diketahui masyarakat luas, baik secara akademis maupun praktis. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *Mappacakke Wanua*, tetapi juga untuk mendokumentasikannya sebagai warisan budaya tak benda yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, pengangkatan judul “Ritual *Mappacakke Wanua* Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Secara Budaya : Pendekatan Etnografi Dan Kajian Budaya” merupakan upaya nyata peneliti dalam menggali, melestarikan, dan mengkaji peran strategis budaya lokal dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi pondasi kehidupan masyarakat Luwu.

Ritual *Mappacakke Wanua* merupakan warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Luwu, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini menjadi manifestasi kearifan lokal yang telah dipraktikkan secara turun-temurun sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi berasal dari morfem *cakke*’ berarti dingin dan *mappa-* membuat jadi nya mendinginkan. Sedangkan secara luas Dalam *lappacakke*” berarti memperbaiki atau menyelesaikan, *ua*” berarti negeri atau wilayah. Melalui tradisi ini, Luwu memiliki wadah musyawarah yang dijunjung tinggi sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dengan



mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. (Pemerintah Kabupaten Luwu. *Profil Budaya Kabupaten Luwu dan Tradisi Adat Daerah*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Luwu, 2020)

Dalam konteks kehidupan modern, ritual *Mappacakke Wanua* tetap relevan sebagai instrumen pemersatu dan penyelesaian konflik yang efektif. Praktik ini mencerminkan kebijaksanaan leluhur dalam membangun sistem sosial yang harmonis, di mana setiap permasalahan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Para tetua adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memimpin prosesi *Mappacakke Wanua*, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan bersama.

Keunikan ritual ini terletak pada prosesi ritualnya yang sarat makna, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Setiap langkah dalam ritual *Mappacakke Wanua* memiliki filosofi tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Luwu, seperti musyawarah (*assitinajang*), keadilan (*adelek*), dan persatuan (*assimellereng*). Tradisi ini juga menjadi bukti nyata bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian masalah sosial, di tengah arus modernisasi yang semakin kuat.

Eksistensi *Mappacakke Wanua* di era kontemporer tidak hanya berperan sebagai pranata sosial, tetapi juga menjadi identitas budaya yang memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Luwu. Dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, tradisi ini tetap bertahan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, sekaligus menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Keberadaannya menjadi pengingat pentingnya menjaga keharmonisan sosial melalui pendekatan kultural yang telah teruji oleh waktu.

Mappacakke Wanua adalah bagian dari kearifan lokal yang turun-temurun oleh masyarakat Luwu. Dalam ting untuk mengkaji bagaimana tradisi ini bukan hanya alat penyelesaian masalah praktis, tetapi juga sebagai tas budaya yang perlu dilestarikan. Di tengah derasny an perubahan sosial yang cepat, penelitian ini bertujuan



untuk menggali dan mendokumentasikan nilai-nilai budaya yang ada, serta menjelaskan pentingnya pemeliharaan tradisi dalam menghadapi tantangan sosial yang ada. Hal ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya melestarikan budaya lokal dan mendukung keberlanjutan tradisi yang semakin terancam. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana *Mappacakke Wanua* berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam masyarakat adat, masalah sosial sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap keseimbangan hubungan antar individu dan kelompok. Penelitian ini penting untuk menilai bagaimana mekanisme penyelesaian masalah dalam tradisi ini dapat menciptakan kesejahteraan kolektif yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi seluruh komunitas.

Masyarakat Luwu dikenal sebagai komunitas yang memiliki hubungan sosial yang sangat erat dan harmonis. Hubungan sosial dalam masyarakat ini dibangun di atas dasar nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, rasa saling menghormati, dan penghargaan terhadap struktur sosial yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Nilai-nilai seperti *masseddi' siri'* (harga diri kolektif), *assitinajang* (musyawarah), dan *assimellereng* (persatuan) menjadi fondasi utama dalam membentuk dan memelihara hubungan antarmasyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antarindividu tidak hanya didasarkan pada kedekatan biologis seperti keluarga, tetapi juga pada relasi sosial yang terbangun melalui adat istiadat, partisipasi dalam kegiatan komunitas, dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh adat. Setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan sosial yang diakui dan dihormati sesuai dengan perannya dalam komunitas. Hubungan sosial ini menciptakan solidaritas yang kuat di antara warga, yang terlihat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan adat, termasuk dalam prosesi *Mappacakke Wanua*.

Sementara itu, interaksi sosial dalam masyarakat Luwu bersifat terbuka, dan dilandasi oleh semangat kebersamaan. Interaksi ini tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga inti, tetapi meluas hingga ke lingkup yang lebih besar. Komunikasi dilakukan secara lisan, dan sering kali melibatkan simbol-simbol budaya yang sakral dan tertentu. Dalam forum-forum adat seperti pertemuan kampung, seluruh elemen masyarakat



mulai dari tetua adat, pemuka agama, hingga masyarakat biasa ikut terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama.

Tradisi *Mappacakke Wanua* menjadi salah satu contoh nyata dari bagaimana hubungan dan interaksi sosial dijalankan dalam masyarakat Luwu. Tradisi ini melibatkan partisipasi kolektif seluruh warga, di mana masing-masing memiliki peran dalam proses ritual, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan. Nilai gotong royong sangat tampak dalam kerja sama yang dilakukan untuk menyiapkan segala kebutuhan ritual, seperti mendirikan panggung adat (*lamming pulaweng*), menyiapkan *wallasuji*, hingga menyambut tamu dan mengatur perjamuan.

Selain sebagai sarana penyelesaian masalah, *Mappacakke Wanua* juga menjadi media yang memperkuat jalinan sosial antarmasyarakat. Melalui interaksi yang terjadi selama proses ritual, masyarakat saling berbagi, saling mendengarkan, dan saling menguatkan dalam semangat persaudaraan. Oleh karena itu, hubungan sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat Luwu tidak hanya menjadi penopang kehidupan bersama, tetapi juga menjadi cermin dari identitas budaya yang telah mengakar kuat dalam tradisi mereka.

Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan, 20 kelurahan dan 207 desa. Wilayah dibagian utara Kota Palopo terdiri dari 6 kecamatan sementara wilayah dibagian selatan Kota Palopo terdiri dari 16 kecamatan. Dari 227 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu, 15 diantaranya berada di Kecamatan Bua. Sedangkan di Kecamatan Walenrang Barat hanya terdapat 6 desa/kelurahan, dan selebihnya tersebar di 20 kecamatan lainnya dengan jumlah 8 sampai 13 desa/kelurahan tiap kecamatan. Sebanyak 11 kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Dari 11 kecamatan tersebut, terdapat 32 desa yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai. Disisi lain, 15 kecamatan memiliki wilayah pegunungan. Dari 15 kecamatan tersebut terdapat 89 desa yang diklasifikasikan sebagai daerah pegunungan.

(Profil Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Luwu)



n masyarakat Luwu dipengaruhi oleh berbagai faktor, pertanian, pertambangan, dan pendapatan per ara dikenal sebagai penghasil kakao terbesar di

Indonesia, sementara Luwu Timur memiliki tambang nikel Sorowako yang menjadi sumber pendapatan penting. Perekonomian Luwu Raya juga didukung oleh sektor pertanian dan pertambangan. Pendapatan per kapita bervariasi antar kabupaten dan wilayah, serta dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan keagamaan masyarakat.

Dalam struktur kebudayaan masyarakat Luwu, khususnya dalam pelaksanaan tradisi seperti *Mappacakke Wanua*, dikenal adanya hirarki budaya yang menentukan peran dan kedudukan setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Hirarki ini tidak bersifat kaku, tetapi dijalankan berdasarkan penghargaan terhadap nilai adat dan pengalaman sosial.

Puncak dari hirarki budaya ditempati oleh pemangku adat (seperti *ma'dikaponrang* dan *opu arung*) yang memiliki otoritas dalam urusan adat dan spiritual. Mereka berfungsi sebagai pengatur ritus, penentu waktu pelaksanaan tradisi, serta penjaga warisan leluhur. Posisi ini diperoleh melalui garis keturunan dan pengakuan sosial, bukan melalui pemilihan formal. (Detikcom, 2014).

Di bawah mereka terdapat tokoh agama dan tetua masyarakat, yang juga memegang peranan penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Para ulama yang terlibat dalam prosesi *Maddoja Roja*, misalnya, menempati posisi tinggi dalam hirarki spiritual karena dipercaya sebagai perantara doa kolektif masyarakat kepada Tuhan.

Selanjutnya, terdapat lapisan warga masyarakat biasa, termasuk para petani, nelayan, pedagang, dan pemuda. Meskipun mereka tidak memiliki otoritas adat, tetapi keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan kolektif dan ritual adat menunjukkan bahwa budaya dalam masyarakat Luwu bersifat partisipatif. Dalam praktiknya, mereka juga menjadi penopang utama dalam pelaksanaan budaya karena menyediakan sumber daya, tenaga, dan dukungan sosial.



Di luar struktur tradisional tersebut, modernisasi juga mulai membentuk hirarki budaya baru, di mana orang yang “berdaya” adalah mereka yang berpendidikan, mengikuti tren, atau memiliki akses terhadap teknologi. Hal ini menjadi pelestarian budaya lokal karena terjadi pergeseran

orientasi dari nilai adat ke arah nilai-nilai modern yang belum tentu sejalan dengan nilai luhur tradisi. (Detikcom, 2014).

Konflik merupakan fenomena sosial yang inheren dalam setiap komunitas manusia, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. Ia muncul sebagai akibat dari ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan nilai, kepentingan, persepsi, maupun distribusi kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat modern, konflik kerap diselesaikan melalui pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada aspek hukum positif dan sanksi. Namun demikian, dalam konteks masyarakat tradisional seperti yang terdapat di Kabupaten Luwu, penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada sistem hukum negara, melainkan juga pada sistem sosial dan budaya lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga kini adalah tradisi *Mappacakke Wanua*, sebuah mekanisme adat yang dilaksanakan secara kolektif oleh masyarakat sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketegangan sosial mulai dari pertikaian antarkelompok, keretakan hubungan sosial, hingga bencana atau musibah yang mengganggu keharmonisan komunitas. Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa dalam masyarakat Luwu, budaya bukan hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai alat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menyatukan kembali masyarakat yang sempat mengalami disintegrasi akibat konflik."

Pada tahun 2002 terjadi konflik horizontal di Kab.Luwu Seperti yang diberitakan, bentrokan antara Desa Kopi-Kopi dengan Desa Karangan itu terjadi karena dendam lama yang berlangsung sejak 1968. Warga diketahui mulai saling serang sejak pukul 19:00 WITA dengan berbagai senjata, termasuk papporo (senjata rakitan yang menembakkan paku dan pecahan kaca). dalam peristiwa tersebut warga dari kedua desa mengungsi dan seorang polisi terluka terkena pecahan papporo. Sebanyak 48 orang dari kedua desa diduga sebagai pelaku bentrokan dan 10 orang terluka, serta 17 rumah menjadi korban pembakaran.



konflik yang melanda wilayah tersebut membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Ketegangan yang

meningkat dari hari ke hari membuat rasa aman warga perlahan-lahan menghilang. Akibat dari konflik tersebut, banyak masyarakat terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan mengungsi ke tempat lain yang dianggap lebih aman. Pengungsian ini bukan semata-mata keputusan individual, melainkan langkah kolektif untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang nyata dan terus berlangsung. Suasana desa berubah menjadi mencekam; teror terjadi hampir setiap saat dan di berbagai penjuru, sehingga masyarakat hidup dalam ketakutan yang mendalam. Salah satu bentuk kekerasan yang paling mengerikan adalah penggunaan senjata tradisional yang dikenal dengan nama *papporo*, yang dalam beberapa kasus mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Beberapa warga dilaporkan meninggal akibat terkena senjata tersebut, dan kejadian ini semakin memperburuk kondisi psikologis dan emosional masyarakat. (Detikcom, 2014).

Secara umum, konflik yang terjadi antara Desa Kopi-Kopi dan Desa Karangan pada tahun 2002 di Kabupaten Luwu merupakan konflik horizontal yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk identitas sosial, sejarah, ekonomi, serta ketegangan budaya yang sudah lama tertanam. Meskipun akar konflik secara langsung lebih bersifat historis dan kultural yakni dendam lama sejak tahun 1968 namun dalam perkembangan di lapangan, unsur agama juga tidak dapat sepenuhnya diabaikan dalam memicu atau memperkeruh ketegangan antarkelompok. Bisnis.com. (13 Oktober 2014)

Pada masa itu, masyarakat kedua desa memiliki komposisi keagamaan yang berbeda, di mana salah satu desa cenderung didominasi oleh kelompok Muslim dan desa lainnya terdapat kelompok Kristen dalam jumlah signifikan. Perbedaan keyakinan ini pada awalnya hidup berdampingan secara relatif damai. Namun, dalam situasi konflik yang memanas, identitas agama menjadi salah satu pembeda sosial yang mudah dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkuat rasa solidaritas kelompok sendiri dan sekaligus menumbuhkan rasa curiga
kelompok lain.



konflik mulai meningkat, narasi berbasis identitas agama digunakan untuk menjustifikasi tindakan kekerasan atau permusuhan. Misalnya, munculnya anggapan bahwa serangan kelompok lain adalah bentuk perlindungan terhadap agama atau

komunitas sendiri. Di sinilah letak potensi politisasi agama, ketika perbedaan keyakinan dijadikan alat provokasi untuk memperdalam polarisasi sosial yang sebenarnya bersumber dari konflik non-agama.

Dalam konteks seperti ini, agama bukan merupakan penyebab utama konflik, melainkan lebih sebagai faktor identitas yang dapat memperkuat segregasi sosial. Konflik yang bermula dari pertikaian lokal, dendam lama, atau perselisihan wilayah dapat berubah menjadi konflik yang tampak berbasis agama jika aktor-aktor tertentu menekankan perbedaan keyakinan dalam membangun narasi konflik.

Namun demikian, agama juga memiliki peran penting dalam proses resolusi konflik. Nilai-nilai keagamaan yang menekankan perdamaian, pengampunan, dan solidaritas dapat menjadi sumber inspirasi dalam upaya rekonsiliasi. Di beberapa kasus pascakonflik di Sulawesi Selatan, termasuk Luwu, tokoh-tokoh agama dari kedua belah pihak sering dilibatkan dalam mediasi sosial dan dalam pelaksanaan tradisi budaya seperti *Mappacakke Wanua* yang mengusung semangat penyucian dan pemulihan moral komunitas. . Portal Kabupaten Luwu, 2022; Repositori UIN Alauddin, 2023).

Dalam keadaan seperti ini, kehidupan ekonomi dan sosial menjadi lumpuh. Warga sangat sulit untuk menjalankan aktivitas di luar rumah, seperti bertani, berkebun, atau bahkan sekadar berinteraksi sosial secara normal. Rasa takut yang mendalam menghantui mereka, dan aktivitas yang biasanya menjadi sumber penghidupan pun terpaksa dihentikan. Ketidakstabilan ini tidak hanya mengancam ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga merusak tatanan sosial yang sebelumnya harmonis. Dalam konteks inilah, masyarakat kemudian mencari cara untuk memulihkan keadaan melalui pendekatan budaya, dan salah satu mekanisme yang dipercaya mampu meredakan konflik serta mengembalikan keharmonisan adalah pelaksanaan tradisi *Mappacakke Wanua*."

E



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ilah

t Luwu memiliki tradisi adat yang disebut *Mappacekke* alankan sebagai respons terhadap berbagai bentuk konflik sosial yang muncul di tengah kehidupan. Gangguan tersebut bisa berupa konflik antarkelompok,

pertikaian internal komunitas, krisis moral, hingga bencana sosial yang mengganggu keseimbangan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kebudayaan lokal membaca dan merespons ketegangan sosial tersebut, serta bagaimana tradisi adat seperti *Mappacekke Wanua* berfungsi sebagai mekanisme pemulihan sosial. Permasalahan yang perlu diidentifikasi adalah bagaimana masyarakat memahami indikator ketegangan sosial, bagaimana kebudayaan lokal memanifestasikan siasat atau strategi penyelesaian konflik, dan sejauh mana ritual tersebut efektif dalam mengembalikan harmoni sosial.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kabupaten Luwu, khususnya di Desa Kopi-kopi dan Karangan sebagai lokasi pelaksanaan tradisi *Mappacekke Wanua*. Fokus kajian dibatasi pada:

1. Proses identifikasi ketegangan sosial yang menjadi latar belakang dilaksanakannya tradisi *Mappacekke Wanua*.
2. Manifestasi siasat kebudayaan dalam bentuk ritual adat sebagai strategi penyelesaian konflik sosial.
3. Tidak mencakup seluruh jenis konflik di Kabupaten Luwu, melainkan hanya konflik yang ditanggapi secara kolektif melalui mekanisme budaya lokal.
4. Penelitian ini menekankan pada pendekatan kualitatif etnografis, dengan pemahaman mendalam terhadap nilai, simbol, dan peran sosial yang terlibat dalam pelaksanaan ritual.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses ritual melibatkan orang-orang yang bertikai dapat melebur menjadi satu?
2. Bagaimana masyarakat Luwu memaknai ritual *Mappacekke Wanua* sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik?



1

skripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk ketegangan sosial melatarbelakangi pelaksanaan tradisi *Mappacekke Wanua* masyarakat Luwu.

2. Untuk mengkaji cara kebudayaan lokal mengukur dan menanggapi ketegangan sosial melalui simbol dan tindakan kolektif.
3. Untuk menjelaskan bagaimana siasat kebudayaan dimanifestasikan dalam ritual *Mappacekke Wanua* sebagai bentuk resolusi konflik sosial yang berbasis adat
4. Untuk menilai sejauh mana efektivitas ritual *Mappacekke Wanua* dalam memulihkan harmoni dan solidaritas sosial masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik itu peneliti maupun orang lain. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu Manfaat teoritis dan manfaat praktis

1) Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori sosial budaya, khususnya dalam konteks fungsionalisme dan penyelesaian konflik berbasis tradisi lokal.
- b. Menjadi referensi bagi kajian-kajian antropologi budaya, khususnya yang mengkaji kearifan lokal sebagai sistem sosial yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat.
- c. Memperkuat perspektif emik dalam memahami peran tradisi dalam struktur sosial masyarakat lokal.

2) Manfaat Praktis:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya tradisi *Mappacekke Wanua* sebagai instrumen perdamaian berbasis budaya lokal.
- b. Mendorong pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial masyarakat Luwu.
- c. Menjadi masukan bagi lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan dalam mengelola konflik secara damai dan partisipatif melalui pendekatan budaya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ritual sebagai Resolusi Konflik (Victor Turner (1969, 1974)

Victor Turner (1969, 1974) dalam karyanya menjelaskan bahwa **ritual merupakan bagian dari "social drama"** atau drama sosial, yaitu proses sosial yang terjadi saat suatu konflik muncul dalam komunitas dan membutuhkan penyelesaian. Menurut Turner, **ritual memiliki fungsi transformatif**, yaitu mengubah ketegangan sosial menjadi harmoni sosial melalui proses simbolik dan emosional. Ritual membawa masyarakat ke dalam **tahap liminalitas**, yaitu kondisi di mana struktur sosial yang biasa dilepaskan sementara, dan digantikan oleh **communitas** ikatan sosial tanpa hirarki yang kuat dan penuh solidaritas. (Turner, 1969, hlm. 205).

Victor Turner dalam bukunya *The Anthropology of Performance* (1988) menjelaskan bahwa sebuah pertunjukan merupakan konsep analisis konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Turner, sebuah pertunjukan drama dapat dijadikan model dalam penelitian ilmu sosial untuk menjelaskan konflik sosial yang selalu tersusun dari bagian berikut; munculnya perbedaan pendapat, yang diikuti keadaan krisis, upaya berdamai, bersatu kembali atau perpecahan. Sebuah genre pertunjukan hanya mencerminkan atau mengekspresikan sistem sosial maupun konfigurasi budaya. Pertunjukan sering kali sebagai kritik langsung atau mengalir dari kehidupan masyarakat tumbuh serta tentang cara masyarakat menangani sejarah. Pertunjukan sering digunakan masyarakat dengan istilah pertunjukan budaya. Melalui pertunjukan budaya inilah berbagai kritik dan cerminan budaya masyarakat diwujudkan.

Victor Turner sebagai seorang tokoh Antropolog, menaruh perhatiannya pada simbol dalam Ritual, menurutnya simbol merupakan unit terkecil yang diisi sejumlah informasi besar yang objek, aktivitas, kata, hubungan, peristiwa gerak tubuh, yang berhubungan dengan nilai-nilai penting masyarakat ungkap nilai-nilai sosial dan Agama yang penting dalam pada hal ghaib (mitos maupun takhayul) yang dapat transformasi bagi sikap dan perilaku manusia. Geertz



(1992 :3-4) menyatakan manusia adalah animal symbolism, artinya manusia berpikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan simbolis. Endaswara (2003 :171-172) juga menyatakan manusia adalah makhluk budaya dan budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme yaitu pemikiran yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri pada simbol atau lambang.

Dalam karyanya yang berjudul *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (1969), antropolog Victor Turner mengemukakan bahwa ritual memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan konflik dan pemulihan harmoni sosial. Menurut Turner, ritual tidak hanya sekadar aktivitas keagamaan atau adat belaka, tetapi merupakan mekanisme simbolis yang membantu masyarakat menghadapi situasi ketika norma-norma sosial sedang goyah atau saat individu maupun kelompok mengalami perubahan status. Dengan mempelajari masyarakat Ndembu di Zambia, Turner mengidentifikasi bahwa ritual, terutama yang dikenal sebagai *rites de passage* atau ritus peralihan, menjadi alat efektif untuk mengelola transisi sosial sekaligus meredakan potensi konflik yang muncul dari perubahan tersebut.

Turner menjelaskan bahwa *rites de passage* umumnya terdiri dari tiga tahap utama: pemisahan (separation), fase ambang (liminal phase), dan reintegrasi (reintegration). Pada tahap pertama, individu dipisahkan dari status sosial sebelumnya, baik melalui upacara formal maupun proses simbolis. Tahap kedua, yaitu fase ambang, merupakan masa transisi di mana peserta ritual berada di luar struktur sosial biasa, tanpa hierarki yang jelas. Di sinilah muncul kondisi yang oleh Turner disebut *communitas*, sebuah ruang egaliter di mana hubungan antar peserta bersifat personal, intens, dan penuh solidaritas. Fase ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi individu dan masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai kolektif, serta mengatasi ketegangan yang mungkin telah terakumulasi sebelumnya. Akhirnya, pada tahap reintegrasi, individu dikembalikan ke masyarakat dengan identitas baru, dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang sesuai dengan status barunya.

Menurut Turner, selama fase liminal, konflik sosial yang mungkin timbul akibat perubahan status dapat dikelola secara simbolis melalui ritual. Proses ritual membantu masyarakat menyembuhkan keretakan sosial, menciptakan ulang rasa persatuan, serta memperkuat ikatan kolektif. Ia menekankan bahwa ritual bukanlah sekadar representasi dari struktur sosial, tetapi justru menjadi wahana bagi munculnya anti-struktur yaitu kondisi di mana norma dan aturan sosial sementara waktu ditangguhkan, sehingga terjadi transformasi dan rekonsiliasi. Sebagaimana ia tuliskan, "*Ritual is a social action, designed to maintain or restore the equilibria of value relations of real or potential crisis*" (Turner, 1969, hlm. 205). Kalimat ini menunjukkan bahwa ritual adalah instrumen dinamis yang digunakan masyarakat untuk



menjaga atau memulihkan keseimbangan sistem nilai dalam menghadapi ancaman konflik atau krisis sosial.

Lebih lanjut, Turner menggarisbawahi pentingnya elemen simbolisme dalam ritual. Simbol-simbol yang digunakan dalam ritual tidak hanya memiliki makna batiniah, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Melalui simbol-simbol tersebut, nilai-nilai, norma, dan identitas kolektif direproduksi dan dilestarikan, bahkan di tengah perubahan atau ketidakpastian. Dengan demikian, ritual menurut Turner bukanlah fenomena statis, tetapi proses hidup yang aktif dalam membangun ulang ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat

2. Teori Fungsionalisme

Secara harfiah arti dasar kata “Fungsi” adalah aktivitas atau kerja yang berdekatan dengan kata “guna”. Kata “fungsi” ternyata mengalami perkembangan, sehingga dalam konteks yang berbeda akan berbeda pula penegrtiannya. Pengertian kata “fungsi” dalam disiplin tentunya akan berbeda dengan konteks sehari-hari. Dalam sosiologi, fungsi itu disamakan dengan sumbangan dalam artian positif (J.van Ball, 1988:53). Juga dalam ruang lingkup penyelidikan mengenai organisasi sosial meliputi struktur dan fungsi dari kelompok. Adapun fungsi tersebut dapat dibagi dalam dua bagian: fungsi yang berhubungan antara kelompok dengan kelompok dan fungsi yang bermacam-macam dari pada kelompok itu adalah pranata-pranata sosial (Harsojo, 1976:243-244)

Bronislaw K. Malinowski mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme, yang beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat. Dengan kata lain pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan bersangkutan. Menurut Malinowski, fungsi dari suatu unsur kebudayaan adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder dari pada warga suatu masyarakat (T.O.lhroni, 1986:59). Menurut Bronislaw K. Malinowski bahwa untuk memperoleh pemahaman yang aktual, peneliti harus terjun langsung ke lapangan ke masyarakat yang menjadi objek penelelitan. (Aljambari, 2012, hlm. 6).

Teori fungsionalisme struktural merupakan sebuah teori yang menganggap bahwa masyarakat, pada dasarnya terintegrasi atas dasar kesepakatan para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, dan merupakan suatu general agreements yang mengatasi perbedaan-perbedaan dan kepentingan di antara para anggota dalam kondisi yang demikianlah masyarakat berkedudukan sebagai karena sifatnya yang demikian, maka aliran pemikiran tersebut disebut functional approach, order approach, equilibrium approach atau dengan lebih sebagai struktural-functional approach. (Selanjutnya disebut pendekatan



fungsional struktural atau fungsionalisme struktural). Teori-teori yang mendasarkan diri pada sudut pendekatan tersebut, biasa dikenal pula sebagai integration theories, order theories, equilibrium theories, atau lebih biasa dikenal sebagai teori-teori fungsional struktural. (Ismail Aljambari 2012:6)

B. Penelitian Relevan

Penelitian pertama dengan judul Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Damai Di Giyanti, Wonosobo. sOleh Nuryani Siti Darisma, dkk .(2018). Jurnal ini mengkaji mengenai Tradisi Nyadran sebagai sebuah kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai perdamaian dan aktualisasinya dalam membangun budaya damai di Giyanti Wonosobo. Adapaun teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian diantaranya: Perdamaian, Hermeneutika, Kearifan Lokal, Budaya Damai, dan Pertahanan Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Adapun sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara langsung dengan berbagai narasumber yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen maupun literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Nyadran di Giyanti sudah digelar sejak tahun 1757, dibagi dalam tiga rangkaian yaitu: rangkaian kegiatan menjelang acara inti Tradisi Nyadran, acara inti Tradisi Nyadran dan Merti Dusun.

Setiap rangkaian kegiatan dalam Tradisi Nyadran memiliki nilai-nilai yang berkorelasi dengan nilai-nilai perdamaian. Pertemuan nilai ini nyatanya mampu menyatukan masyarakat Giyanti yang berbeda dari segi agama, suku dan golongan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Nyadran diaktualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Giyanti. Masyarakat yang merasa memiliki sejarah yang sama dan berasal dari satu ikatan keluarga membuat budaya damai kian nyata di Dusun Giyanti. Hasil lain dari penelitian yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat universal seperti halnya dalam Tradisi Nyadran di Giyanti, terbukti berkontribusi dalam membangun budaya damai yang berkorelasi dengan upaya pertahanan negara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian kedua dengan judul Politik Budaya Melayu: Strategi Kebudayaan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Menghadapi Tantangan Global, oleh Andi Candra Jaya.(2019). Tiga kategori tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Melayu adalah



ika internal Melayu dan mobilitas yang menempatkan Melayu sebagai terbuka. Kedua, pengaruh negara yang semakin besar dalam penataan proses globalisasi telah memberi pilihan-pilihan baru dalam kehidupan dan budaya Melayu, khususnya di Kota Palembang. Ketiga tantangan mungkin terjadinya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat Melayu

berupa ketegangan ekonomi, politik, dan respon kebudayaan. Teknik pengumpulan data tulisan ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan Focus Group Discussion. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik, teori resolusi konflik dan teori reproduksi kebudayaan. Paling tidak ada tiga arti penting kajian ini. Pertama, diperolehnya satu peta sustensi dan resitensi budaya atas berbagai tekanan dari luar kebudayaan. Kedua, menegaskan konstektualisasi budaya sebagai jawaban atas kritik yang menempatkan kebudayaan sebagai faktor statis. Ketiga, memberikan peluang bagi revitalisasi dan rekayasa budaya dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat Melayu yang dinamis.

Penelitian ketiga dengan judul Komunikasi Budaya Adat Mosehe Dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Di Kabupaten Konawe, oleh Saukat Arinra Mondihodkk.(2023) Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui, menejlaskan dan memahami komunikasi budaya adat *mosehe* dalam menyelesaikan konflik masyarakat kabupaten konawe. penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional oleh kingsley davis dan michael denton dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposif* dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumntasi dan studi pustaka. penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam penyelesaina konflik dimasyarakat kabupaten konawe dapat diselesaikan dengan mengikuti tradisi adat mosehe yang didalamnya terdapat 2 unsur penting dalam menyelesaikan konflik, yang meliputi *mbusehe* yang merupakan tokoh adat yang diangkat sebagai penerang adat dalam sebuah desa karena kepandiannya dalam menjelaskan sesuatu serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan penting nan-sakral yang memahami makna simbol, *kalo sara* yang dijadikan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan selisih paham di masyarakat, kabupaten konawe *kalo sara* dimaknai sebagai falsafah yang mengandung makna bahwa siapa yang menaati aturan akan dihargai dan dihormati, sebaliknya siapa yang melanggar aturan akan menerima sanksi atau hukum dan ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian keempat dengan judul Peran Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi Konflik, oleh Samsu Ode dan Nur Aini Rachmawati.(2017). Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang terus ada dalam kehidupan manusia. Budaya lokal memegang peranan penting dalam proses manajemen konflik. Nilai-nilai budaya lokal diyakini mampu menjadi alternatif dalam fase-fase penurunan intensitas konflik. Indonesia dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi memiliki banyak sekali ng di satu sisi mampu menjadi media resolusi konflik walaupun harus juga menjadi pemicu terjadinya banyak konflik sosial yang memunculkan (Suku, Bangsa, Ras dan Agama). Kajian ini berusaha ingin melihat



bagaimana relevansi dan peranan budaya lokal sebagai media resolusi konflik sosial. Nilai-nilai budaya lokal dapat digunakan sebagai media resolusi konflik yang ada di tingkat lokal walaupun pada kenyataannya, perubahan dan juga kemajuan zaman terus menggerus nilai-nilai budaya lokal yang ada.

Penelitian ke lima dengan judul Pengaruh Budaya *Mappacakke Wanua* Di Tinjau Dari Pandangan Aqidah Islam Yang Ada Di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Oleh Abd.Halid.(2023). penelitian menunjukkan bahwa ritual *Mppacakke Wanua* merupakan ritual yang di dilaksanakan secara turun temurun. Ritual ini di dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan rasa Syukur kepada Allah SWT karena terhindar dari konflik, bencana dan malapetaka. Proses ritual *Mappacakke Wanua* di tinjau dari beberapa tahapan yaitu, *Mallekka Wae* (mengambil air), *Maddoja Roja* (berjaga semalaman), dan *Mangeppi Wae* (memercikkan air).

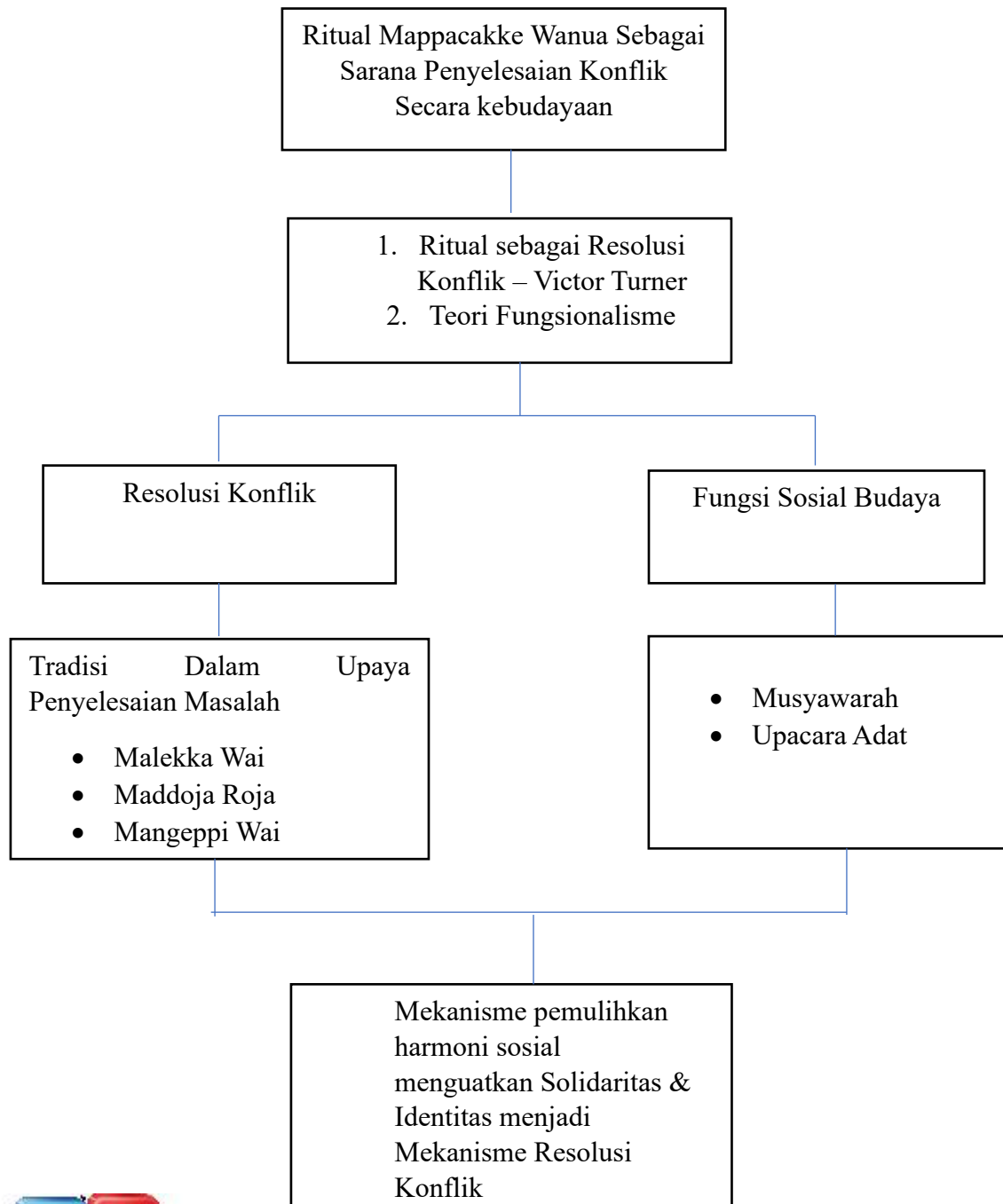
Dalam ritual *mappacekke wanua* ini ada masyarakat yang menerima dan ada masyarakat yang menolak, masyarakat yang menerima ritual ini sangat antusias apabila dilakukan ritual ini karena mereka menganggap bahwa ritual ini dapat memperlihatkan nilai kebersamaan, menjalin silaturahmi yang baik, nilai religi serta pengenalan budaya yang masi berkembang di tanah luwu, sedangkan yang menolak menganggap bahwa ritual ritual ini sebnarnya tidak sesuai dengan agama yaitu agama Islam. Ritual *mappacekke wanua* di kaji dari segi pandaangan Aqidah islam, pada dasarnya dilakukan dengan syarat tidak lepas dari keyakinan dan niat masyarakat untuk terjerumus kepada perbuatan musyrik yang sangan merusak Aqidah islam.

C. Kerangka Pikir

Penelitian tentang Ritual *Mappacakke Wanua* Sebagai Upaya Masyarakat Luwu Dalam Memecahkan Masalah di dasari oleh bebrapa kondisi dan permasalahan yang saling berkaitan. Kerangka berpikir ini menjelaskan alur logis penelitian dari awal hingga hasil yang di harapkan. Adanya modernisasi yang semakin pesat di Masyarakat Luwu. Modernisasi ini membawa dampak pada setiap konflik-konflik yang terjadi dalam tradisi *Mappacakke wanua* selain itu masih terbatasnya dokumentasi komprehensif tentang tradisi ini meyebabkan kesulitan tentang proses pewarisan pengetahuan kepada generasi muda. Penelitian mengenai Ritual Mappacakke Wanua Sebagai Upaya Masyarakat Luwu Dalam Memecahkan Masalah. tidak hanya penting untuk dokumentasi budaya, akan tetapi memiliki implikasi praktis bagi Upaya pelestarian kebudayaan yang ada dalam Masyarakat Luwu. Melalui pendekatan sistematis dan komprehensif penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan an penguatan identitas Masyarakat Luwu.



BAGAN KERANGKA PIKIR



D. Definisi Operasional

1. *Malekka Wae* (pengambilan air suci), *Maddoja Roja* (doa kolektif oleh sembilan ulama), dan *Mangeppi Wae* (pemercikan air suci ke seluruh wilayah).
2. Assitinajang secara operasional merujuk pada proses diskusi bersama dalam komunitas adat Luwu yang dilakukan untuk menyepakati penyelesaian masalah secara damai.
3. Masseddi' siri' adalah konsep kehormatan sosial masyarakat Bugis-Makassar yang dalam konteks operasional merujuk pada rasa malu atau kehormatan bersama yang dijaga melalui perilaku etis dan partisipasi aktif dalam upaya penyelesaian konflik, termasuk dalam pelaksanaan tradisi Mappacakke Wanua.

